

Ciri-ciri Fahaman Pluralisme Agama¹

Dr. Anis Malik Thoha

Perdebatan dan kontroversi tentang masalah Pluralisme kembali menghangat di Indonesia. Meskipun masalah ini sudah banyak ditulis dan didiskusikan, pro-kontra itu terus saja berlangsung. Dalam mencermati hiruk-pikuk wacana “Pluralisme” pada umumnya, dan “Pluralisme Agama” khususnya, yang tengah marak di rantau kita pada dasawarsa pertama abad ke-21 ini; pun juga dalam berbagai kesempatan mengisi berbagai workshop, seminar dan konferensi, khusus mengenai isu dan wacana tersebut, saya merasa gamang, ada sesuatu yang sangat mengusik nalar kesadaran.

Bagaimana tidak? Wacana ini sudah sedemikian melebar dan meluas, serta merambah ke berbagai ranah, dan disahami oleh berbagai kalangan – mulai dari politisi, budayawan, agamawan sampai akademik, tapi topik utama yang diwacanakan ini nyaris tidak pernah benar-benar diupayakan pendefinisian secara teknis atau sesuai dengan yang dimaksudkan oleh para ahlinya. Padahal inilah langkah metodologis awal yang mesti dilakukan oleh siapa pun yang *interest* dan berkepentingan dengan isu ini. Lebih dari itu, sebetulnya masalah ini adalah masalah tuntutan logis belaka yang niscaya, yang jika diabaikan maka secara tak terhindarkan akan menciptakan tidak saja kerancuan atau kebingungan (*confusion*), tapi juga pada akhirnya mengaburkan dan bahkan menyesatkan (*misleading*).

Para ulama kita terdahulu dari berbagai bidang dan disiplin ilmu ternyata sangat peka dan menyadari betapa krusialnya problem definisi ini sebelum mereka mengupas bahasan-bahasan di bidang masing-masing secara detail. Para *fuqaha*’, misalnya, begitu sistematis dalam mengupas masalah-masalah *fiqh*, dimulai dengan definisi-definisi yang gamblang secara *lughawy* maupun *teknisnya*: apa itu *taharah*, *wudhu*, *tayammum*, mandi, dsb. Tapi sayang sekali, dewasa ini model dan tradisi semacam ini tampak banyak ditinggalkan oleh kalangan kita, khususnya dalam hal berwacana Pluralisme Agama.

Entah karena sebab *oversight* atau apa, yang jelas pada hakekatnya tidak banyak di kalangan kita yang mencoba mengerti atau memahami, apalagi mempersoalkan problem definisi ini dengan betul dan bijak. Seakan-akan istilah Pluralisme Agama ini sudah cukup jelas dan, oleh karenanya, boleh *taken for granted*. Padahal, istilah “pluralisme” itu jelas-jelas istilah (baca: ideology/ajaran) pendatang yang merangsek ke alam sadar dan di-bawah-sadar kita bersama-sama dengan istilah-istilah dan ideologi-ideologi asing yang lain, seperti *democracy*, *humanism*, *liberalism*, dsb. yang tentu saja tidak bisa kita maknai seenak kita atau menurut “selera” dan asumsi kita.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kebanyakan orang yang ditokohkan di kalangan kita beranggapan secara simplistis bahwa “pluralisme = toleransi”, dan “pluralisme agama = toleransi agama”. Fakta ini dapat dilihat daripada ingar-bingarnya reaksi dan respons yang cenderung “emosional” terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada tahun 2005 tentang hukum haramnya Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme (atau yang dikenal dengan SIPILIS), dan juga terhadap resolusi Muzakarah Ulama Se-Malaysia,

¹ Makalah ini disampaikan dalam symposium *Wacana Fahaman Pluralisme Agama dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Islam*, anjuran bersama Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia (MUFAKAT) dan Himpunan Keilmuan Muda (HAKIM) dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), pada hari Sabtu, 1 Mei 2010, bertempat di Conference Hall, Tingkat 3, Kulliyah Ekonomi UIAM, Gombak.

2006, di Negeri Perak, Malaysia, yang dibacakan oleh Mufti Perak, Datuk Dr. Harussani, yang menegaskan hukum yang sama dengan fatwa MUI.

Yang menyedihkan, anggapan atau asumsi simplistik ini tidak hanya terbatas pada kalangan “awam” (yang memang tak terdidik secara akademis dalam bidang ini), tapi *hatta* kalangan para tokoh atau yang ditokohkan yang memang spesialisasi akademiknya di bidang ini pun tampak begitu *over-confident* dengan pemahamannya yang simplistik tadi.

Salah satu contoh yang paling konkrit adalah sebuah Disertasi Doktor di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, yang kemudian diterbitkan pada awal tahun 2009 yang lalu dengan judul *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*. Dalam buku ini tak nampak ada upaya yang serius dari pengarangnya untuk mendiskusikan definisi teori atau faham Pluralisme Agama yang menjadi topik utama bahasannya, malah terjebak pada pengertian yang keliru dan mengelirukan di atas tadi. Pembaca yang cermat tidak perlu bersusah-payah melongok kedalamnya, dari judul saja sudah cukup untuk mengetahui apa gerangan yang dimaksudkan oleh pengarangnya tentang faham Pluralisme Agama ini, yang tiada lain adalah “toleransi agama”. Fatal!

Tapi meskipun demikian, anehnya buku ini mendapat sambutan yang luar biasa oleh media massa kita, dan juga sanjungan dan pujian yang sangat berlebihan dari sederet nama orang-orang yang ditokohkan di masyarakat Indonesia dengan latar-belakang yang beragam yang jumlahnya lebih dari selusin. Hal ini semakin membuktikan betapa kacaunya dunia pemikiran dan akademik di kalangan kita.

Anggapan bahwa “pluralisme agama = toleransi agama” adalah anggapan subyektif yang jelas-jelas ditolak oleh para pakar dan penganjur pluralisme sendiri. Diana L. Eck, direktur *The Pluralism Project* di Universiti Harvard, Amerika Syarikat, misalnya, dalam penjelasan resminya yang berjudul “What is Pluralism?” dan diulangi dalam “From Diversity to Pluralism”,² menyuguhkan empat karakteristik utama untuk mendefinisikan sosok fahaman/ajaran ini secara detail. Dia menyatakan:

Here are four points to begin our thinking:

- First, pluralism is not diversity alone, but *the energetic engagement with diversity*. Diversity can and has meant the creation of religious ghettos with little traffic between or among them. Today, religious diversity is a given, but pluralism is not a given; it is an achievement. Mere diversity without real encounter and relationship will yield increasing tensions in our societies.
- Second, pluralism is not just tolerance, but *the active seeking of understanding across lines of difference*. Tolerance is a necessary public virtue, but it does not require Christians and Muslims, Hindus, Jews, and ardent secularists to know anything about one another. Tolerance is too thin a foundation for a world of religious difference and proximity. It does nothing to remove our ignorance of one another, and leaves in place the stereotype, the half-truth, the fears that underlie old patterns of division and violence. In the world in which we live today, our ignorance of one another will be increasingly costly.
- Third, pluralism is not relativism, but *the encounter of commitments*. The new paradigm of pluralism does not require us to leave our identities and our commitments behind, for

² Masing-masing dapat diakses dan dibaca pada link berikut: http://pluralism.org/pluralism/what_is_pluralism.php; dan http://pluralism.org/pluralism/essays/from_diversity_to_pluralism.php),

pluralism is the encounter of commitments. It means holding our deepest differences, even our religious differences, not in isolation, but in relationship to one another.

- Fourth, pluralism is *based on dialogue*. The language of pluralism is that of dialogue and encounter, give and take, criticism and self-criticism. Dialogue means both speaking and listening, and that process reveals both common understandings and real differences. Dialogue does not mean everyone at the “table” will agree with one another. Pluralism involves the commitment to being at the table -- with one’s commitments.

Keempat-empat karakteristik yang diberikan oleh Diana L. Eck ini sudah sangat jelas atau *self-explanatory*. Tapi dalam essay pendek ini, rasanya perlu sedikit mengulas poin kedua dan ketiga.

Eck menyatakan dalam poin kedua bahwa: “*pluralism is not just tolerance*,” yang bermakna “*pluralisme bukanlah sekedar toleransi*.” Pernyataan yang lebih kurang sama juga dia sampaikan dalam *keynote addressnya* yang berjudul “*A New Religious America: Managing Religious Diversity in a Democracy: Challenges and Prospects for the 21st Century*” pada *MAAS International Conference on Religious Pluralism in Democratic Societies*, di Kuala Lumpur, Malaysia, Agustus 20-21, 2002. Lebih lanjut ia berkata dalam *keynote addressnya*:

I would propose that *pluralism goes beyond mere tolerance* to the active attempt to understand the other... Although tolerance is no doubt a step forward from intolerance, it does not require new neighbors to know anything about one another. Tolerance comes from a position of strength. I can tolerate many minorities if I am in power, but if I myself am a member of a small minority, what does tolerance mean? ... *a truly pluralist society will need to move beyond tolerance toward constructive understanding*... Tolerance can create a climate of restraint, but not a climate of understanding. *Tolerance is far too fragile a foundation* for a religiously complex society, and in the world in which we live today, our ignorance of one another will be increasingly costly. (penegasan dari penulis)

Jadi sangat jelas sekali apa yang dimaksudkan dengan pluralisme oleh kaum pluralis sejati. Mereka tidak mengingkari pentingnya toleransi, “*There is no question that tolerance is important*,” kata Eck dalam makalahnya yang lain (“From Diversity to Pluralism”), tapi segera setelah itu ia tambahkan: “*but tolerance by itself may be a deceptive virtue*” (tetapi toleransi itu sendiri boleh jadi menjadi suatu budi-pekeri/kebaikan yang menipu). Pandangan miring terhadap toleransi ini sebetulnya sudah mulai dilantunkan kalangan pemikir pluralis semenjak tahun 60-an pada abad ke-20 yang lalu.

Sebut saja, misalnya, Albert Dondeyne yang dalam bukunya, *Faith and the World*, yang terbit di Dublin oleh Gill and Son pada tahun 1963, menulis: “Let us note that what was then called tolerance would be considered today as the expression of systematic intolerance. In other words, tolerance was then almost synonymous with moderate intolerance.” (*Mari kita catat bahwa apa yang dahulu dinamakan toleransi, kini telah dianggap sebagai sebuah ekspresi ketidaktoleranan yang sistematis. Dalam istilah lain, toleransi dengan begitu hampir sinonim dengan intoleransi yang moderat*).³

Bahkan sebelumnya Arnold Toynbee, seorang sejarawan Inggris terkemuka, dalam bukunya, *An Historian’s Approach to Religion*, yang terbit di London oleh Oxford University Press, tahun 1956, sudah mewanti-wanti bahwa “toleransi tidak akan memiliki arti yang positif,” bahkan “tidak sempurna dan hakiki, kecuali apabila manifestasinya berubah menjadi kecintaan.”⁴

³ Albert Dondeyne, *Faith and the World* (Dublin: Gill and Son, 1963), hal. 231.

⁴ Arnold Toynbee, *An Historian’s Approach to Religion* (London: Oxford University Press, 1956), hal. 251.

Yang perlu digaris-bawahi di sini adalah bahwa bagi kalangan pluralis sejati, Pluralisme pada umumnya dan Pluralisme Agama pada khususnya bukanlah sekadar toleransi belaka, sebagaimana yang jamak di(salah)fahami oleh kalangan pentaklid pluralis. Penekanan Pluralisme lebih pada “kesamaan” atau “kesetaraan” (*equality*) dalam segala hal, termasuk “beragama”. Setiap pemeluk agama harus memandang sama pada semua agama dan pemeluknya. Oleh kerananya, sejatinya pandangan ini pada akhirnya akan menggerus konsep keyakinan “iman-kufur”, “tawhid-syirik”, yang sangat sentral dalam agama Islam.

Sedangkan poin ketiga, “pluralism is not relativism, but *the encounter of commitments*,” penulis terus terang merasa gagal untuk dapat memahaminya dengan baik. Poin ini sebetulnya juga sudah lebih dahulu dinyatakan secara argumentative oleh John Hick, salah seorang “nabi” pluralism, dalam bukunya *The Rainbow of Faiths*, untuk merespons tuduhan relativisme ajaran pluralism agamanya yang diangkat oleh para pengkritiknya. Tapi saying sekali respons ini terasa hambar.⁵ Begitu juga pernyataan Diana Eck, meskipun ia kemudian berusaha memberikan penjelasan bahwa: “The new paradigm of pluralism does not require us to leave our identities and our commitments behind, for pluralism is the encounter of commitments,” namun poin ini justru semakin kabur atau bahkan bercanggah dengan poin pertama. Sebab, bagi seorang beragama (apa pun agamanya), identiti dan komitmennya adalah terletak pada “keimanan akan kebenaran tunggal dan absolute agamanya”. Dalam berinteraksi atau berdepan (*encounter*), atau membangun hubungan, dengan pemeluk agama lain, ianya akan selalu *committed* pada prinsip keyakinannya tadi dan tak akan pernah kompromi atau merelativisasikannya. Tetapi pertanyaan yang berbangkit kemudian adalah, pada level keyakinan, apakah mungkin seseorang yang *committed* memegang teguh keyakinannya yang absolute, akan dapat mengakui/menerima kebenaran agama lain? Atau dengan kata lain, apakah mungkin seseorang yang *committed* memegang teguh keyakinannya yang absolute akan dapat mengakui/menerima bahwa “semua agama adalah valid dan otentik”, sebagaimana yang diajarkan oleh, misalnya, John Hick?⁶

Berdasarkan penalaran seperti ini, saya berpendapat, yang ternyata banyak juga para peneliti/penulis berpendapat seperti saya, bahwa “pluralisme = relativisme”, sebab kesimpulan bahwa “semua agama adalah sama, valid dan otentik” tidak mungkin atau mustahil dapat tercapai tanpa didahului proses relitivisasi dan reduksionisasi agama-agama.⁷

Memang sedari awal konsep/fahaman/ajaran pluralisme agama ini sudah tampak jelas berbenturan dengan akal dan logika sehat, maka argumen apa pun yang dikembangkan untuk menyokongnya akan semakin menambah dan memperjelas kerancuannya.

Dari paparan ringkas ini dapat disarikan bahwa pluralisme agama sebetulnya adalah ajaran demokrasi dalam beragama yang lebih menitik-beratkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Sebab secara nasab, pluralism agama ini adalah “anak sah” yang terlahir dari “rahim” demokrasi. Oleh kerananya, secara geneologis pluralisme agama ini secara otomatis dan tak-terhindarkan mewarisi watak dan karakter demokrasi; diantaranya yang paling kentara dan menonjol adalah:

⁵ John Hick, *The Rainbow of Faiths* (London: SCM Press, 1995), hal. 50ff.

⁶ Lihat John Hick, *The Fifth Dimension* (Oxford: One World, 2004), hal. 10, 77-79; dan bukunya, *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent* (London: Macmillan, [1989] reprinted 1991), hal. 247.

⁷ Lihat analisis lebih lanjut dalam Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis* (Jakarta: Perspektif GIP, 2005).

1. Kesetaraan atau persamaan (*equality*). Ajaran pluralisme agama mengajarkan semua agama sama dan setara, tak ada yang paling baik dan tak ada yang paling buruk.
2. Liberalisme atau kebebasan. Ajaran pluralisme agama mengajarkan hak kebebasan beragama, dalam arti keluar-masuk agama. Hari ini seseorang boleh menjadi Muslim, esok menjadi Kristen, esok lusa menjadi Hindu, dan seterusnya.
3. Relativisme. Sebetulnya ini adalah implikasi dari kedua watak yang sebelumnya. Ajaran pluralisme agama mengajarkan kebenaran agama relative.
4. Reduksionisme. Untuk sampai kepada kesetaraan atau persamaan, ajaran pluralisme agama telah meredusir jati-diri atau identitas agama-agama menjadi entiti yang lebih sempit dan kecil, yakni sebagai urusan pribadi (*private affairs*). Dengan kata lain pluralism agama itu berwatak sekular.
5. Eksklusivisme. Ramai orang yang gagal mengidentifikasi dan memahami watak atau ciri yang satu ini. Hal ini disebabkan selama ini ajaran pluralisme agama ini diwar-warkan sebagai anti-eksklusivisme. Ia sering menyuguhkan dirinya sebagai ajaran yang “tampak” ramah dan sangat menghormati ke-berbedaan (*the otherness*) dan menjunjung tinggi kebebasan. Tapi pada hakikatnya, dia sebetulnya telah merampas kebebasan pihak lain dan menginjak-injak serta memberangus ke-berbedaan, apabila dia mendeklarasikan-diri dan mengkleim sebagai pemberi tafsir/teori/ajaran tentang kemajemukan/keberagaman/keberbagaian agama-agama yang absolute benar, i.e., “bahwa semua agama sama.” Jadi sesungguhnya ia telah merampas dan menelanjangi agama-agama dari kleim kebenaran absolute-nya masing-masing untuk kemudian dimiliki dan dimonopoli oleh dirinya sendiri secara eksklusif.

Barangkali inilah ciri-ciri utama yang menonjol yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau mengenal-pasti sosok ajaran pluralisme agama, sehingga kita tidak keliru memahaminya dan tidak terjebak dalam ketersesatan akibat ke-tidak-tahuan yang kita ciptakan sendiri.

Kerana itu, memang umat Islam harus sangat berhati-hati dalam mengadopsi satu istilah atau fahaman yang jika tidak berhati-hati akan dapat merusak keimanannya sendiri. Islam – sejak awal kelahirannya – sudah memiliki konsep yang jelas bagaimana memandang agama lain dan bagaimana berhubungan dengan pemeluk agama lain. Seharusnya konsep inilah yang digali dan dikembangkan, bukan justru mengadopsi konsep yang lahir dari masyarakat yang selama ratusan tahun tidak mengakui, bahkan menindas keberagaman (pluralitas).